

BAB III

SIKAP CINA MENOLAK RESOLUSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) TERHADAP ISU ROHINGYA DI MYANMAR

Dalam bab ini kita akan membahas mengenai sikap diam Cina terhadap isu Rohingya di Myanmar. Cina merupakan sekutu lama dari Myanmar yang memiliki hubungan baik hingga kini. Kedekatan yang terjalin antara kedua negara ini terlihat saat terjadinya isu Rohingya di Myanmar. dimana Cina berusaha untuk melindungi Myanmar dari selama periode sanksi dan pengucilan internasional terhadap junta militernya hingga melawan tekanan dari dunia internasional bersama dengan Rusia karena isu Rohingya. maka dari itu baik Rusia maupun Cina, kedua negara ini terus mencegah keluarnya statemen anti Myanmar di Dewan Keamanan terkait pembantaian etnis Rohingya.

Terjadinya isu Rohingya ini mengakibatkan Ratusan ribu orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh dan wilayah perbatasan kedua negara, setelah peristiwa yang digambarkan sebagai pembersihan etnis, pemerkosaan, serta pembakaran desa-desa oleh militer Myanmar. Etnis Rohingya yang merupakan salah satu etnis yang ada di Myanmar diperlakukan tidak adil dan mendapat tindakan kekerasan yang seharusnya tidak dilakukan oleh suatu negara dalam melindungi dan menjaga warga negaranya untuk itu dalam bab ini kita akan membahas mengenai etnis Rohingya, kemudian respon dunia internasional terhadap isu Rohingya ini dan sikap diam Cina terhadap etnis Rohingya di Myanmar.

A. Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya

Myanmar merupakan sebuah negara dengan tingkat keragaman etnis yang tinggi yaitu sebanyak 135 etnis mendiami kawasan ini. Etnis mayoritas yang mendiami Myanmar adalah burma untuk itu sejarah Myanmar dulu, disebut burma yang penuh dengan perang yang nyaris tanpa henti. Upaya pemerintah pusat yang melakukan burmaisasi kelompok-kelompok etnis yang ada merupakan sumber utama konflik dan instabilitas domestik. Hal ini menjadi kecemburuan sosial bagi etnis minoritas lainnya yang ada di Myanmar yang dianggap tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat. Etnis minoritas tentu saja tidak tinggal diam dan melakukan perlawanan kepada aparat militer pemerintah pusat. Salah satunya adalah etnis Karen yang merupakan etnis minoritas di Myanmar.

Etnis Karen membentuk Karen National Union (KNU) tahun 1947. Tahun 1976 beberapa kelompok minoritas ikut bergabung dalam sebuah persekutuan militer NDF (*National Democratic Front*) yang bertujuan membela diri dari tekanan militer pasukan pemerintah burma. Regim militer burma melakukan penangkapan terhadap Aung San Suu Kyi sebagai pimpinan NLD (Liga Demokrasi Nasional) dan tidak segan untuk melakukan tindakan yang tegas bagi para kelompok etnis yang melakukan pemberontakan. Hal ini juga yang dialami oleh etnis Rohingya yang mengalami tindakan pemerkosan, pemerasan, penganiayaan bahkan pembakaran tempat tinggal sehingga banyak dari etnis Rohingya yang pergi meninggalkan Myanmar. Sebab itu, Myanmar di terpa dengan isu krisis Kemanusiaan.

Krisis kemanusiaan merupakan sebuah situasi dengan penderitaan manusia yang berada pada tingkat tinggi, dasar-dasar kesejahteraan manusia yang berada dalam bahaya, dan mencakup skala yang besar (Internews, 2014). Secara umum, terdapat tiga kategori penyebab krisis kemanusiaan. Pertama,

faktor bencana alam yaitu adanya bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan sebagainya sebagai penyebab krisis kemanusiaan. Contoh dari krisis kemanusiaan ini ialah banjir di Pakistan tahun 2010, tsunami di kawasan Asia pada tahun 2004 dan 2005, dan lain sebagainya. Faktor kedua ialah *complex emergencies*, yaitu adanya konflik yang memicu krisis kemanusiaan. Contoh dari krisis kemanusiaan dalam kategori ini adalah genosida di Rwanda tahun 1994, dan sebagainya. Ketiga, adalah masalah krisis lainnya yakni menyangkut masalah kesehatan, industri dan finansial. Contohnya adalah *Bhopal gas tragedy* tahun 1984, krisis harga pangan yang melanda berbagai negara tahun 2008 dan sebagainya (Internews, 2014).



Gambar 3.2 : Kondisi Etnis Rohingya di Myanmar

Berdasarkan klasifikasi penyebab krisis kemanusiaan di atas, kasus krisis kemanusiaan etnis Rohingya termasuk dalam kategori *complex emergencies*. Hal tersebut dikarenakan krisis kemanusiaan etnis Rohingya merupakan tindakan diskriminatif terhadap etnis minoritas yang

dilakukan oleh etnis mayoritas di Myanmar yakni etnis Burma atau Buddha. Awal penyebutan etnis Rohingya dan bagaimana mereka bisa masuk ke Myanmar masih menjadi sejarah yang diperdebatkan hingga saat ini. Beberapa sejarawan mengatakan bahwa kata Rohingya berawal dari bahasa arab “Rahma” yang berarti pengampunan. Kata ini merujuk dari cerita pedagang Arab yang terancam hukuman mati oleh Raja Arakan pada abad ke-18. Namun, karena penduduk Arakan kesulitan untuk mengucapkan kata “Rahma” sehingga mereka menyebutnya “Raham” yang kemudian berubah lagi menjadi “Rohang” dan akhirnya berubah menjadi “Rohingya”. Terlepas dari apakah etnis Rohingya merupakan sebuah etnis atau tidak, asli warga Myanmar atau tidak yang jelas berdasarkan sejarah, etnis Rohingya merupakan komunitas migran dari Bangladesh yang sudah ratusan tahun tinggal di Arakan, Myanmar(Rube, 2017).

Sebagai etnis yang sudah lama menetap disebuah wilayah yang kemudian, menjadi Arakan merupakan salah satu negara bagian di Myanmar yang berbatasan dengan Bangladesh yang sekarang bernama Rakhine. Bagian dari negara Myanmar, seharusnya etnis Rohingya mendapatkan hak-hak dasar mereka, terutama status kewarganegaraan. Perbedaan agama, fisik, dan bahasa di mana etnis Rohingya berbicara seperti bahasa Bengali dijadikan alasan oleh pemerintah Myanmar untuk tidak menjadikan etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar.

Pemerintah Myanmar menganggap bahwa etnis Rohingya adalah pendatang atau imigran gelap yang tidak bisa diakui sebagai warga negara. Menurut pemerintah Myanmar antara 1826 dan 1948 etnis Rohingya dibawa dari India oleh Inggris selama pemerintahan kolonial untuk bekerja sebagai petani di perkebunan di Myanmar. Beberapa pihak mengatakan bahwa etnis Rohingya berasal dari Bangladesh dan ada juga yang mengatakan mereka datang dari negara bagian Rakhine di Tenggara Myanmar. Tidak

diakuinya etnis Rohingya saat ini berbanding terbalik dengan pada masa pemerintahan Jenderal U Nu pada tahun 1949. Pada saat kepemimpinan U Nu ada orang dari etnis Rohingya yang masuk dalam pemerintahan seperti Sultan Mahmoud yang menjadi Menteri Kesehatan.

Namun setelah kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Ne Win pada 1962, pemerintah Myanmar tidak lagi mengakui etnis Rohingya dengan menganggap bahwa populasi Muslim yang tinggal di Rakhine adalah Bengali atau imigran gelap dari Bangladesh. Terlebih lagi saat dilakukannya berdasarkan sensus tahun 2014 dengan total penduduk negara bagian Rakhine tercatat 3,100.000 lebih, sebagian besar adalah suku Rakhine yang mayoritas adalah pemeluk Buddha 96,2%, penduduk yang beragama Kristen 1,8 dan 1,4% Muslim tetapi tidak mencakup Rohingya. Rohingya tidak turut disensus karena dianggap bukan warga negara. Hal ini dibuktikan dengan tidak masuknya Rohingya dalam daftar 135 etnik yang diakui sah sebagai warga negara Myanmar berdasarkan undang-undang 1982, sehingga etnis Rohingya tak mendapat akses yang bebas seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja. Kekerasan yang dialami etnis Rohingya meletus pada tanggal 25 Agustus di negara bagian Rakhine, Myanmar. Saat pasukan keamanan negara melancarkan operasi terhadap etnis Rohingya. Hal ini memicu masuknya pengungsi baru ke negara tetangga Bangladesh, meski begitu negara tersebut menutup perbatasannya untuk para pengungsi (Maulana, 2017). Hal ini kemudian menjadi sorotan dunia internasional atas perlakuan yang dilakukan junta militer terhadap etnis Rohingya, namun sebelum terjadinya isu Rohingya ini komunitas Buddha dan komunitas Muslim hidup damai berdampingan, keadaan berubah pada 2012 yaitu terjadinya kerusuhan komunal yang menyebabkan sekitar 200 orang dari kedua kubu meninggal dunia dan ribuan rumah dibakar.

B. Berbagai Kecaman Internasional Terhadap Myanmar

Krisis kemanusiaan yang terjadi oleh etnis Rohingya ini banyak menyita perhatian dunia internasional ditambah dengan sikap yang dilakukan oleh penerima penghargaan Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi seharusnya menggunakan pengaruhnya untuk mengakhiri kekerasan yang terjadi pada etnis Rohingya. Banyak pertanyaan dari berbagai elemen baik dari tokoh internasional, negara-negara Barat, negara-negara Islam dan negara tetangga Myanmar seperti negara-negara di Asia Tenggara. Bentuk protes isu Rohingya ini mendapat beragam tanggapan dan respon terhadap Myanmar yang dianggap melakukan pembersihan etnis Rohingya.

Sebagai sebuah organisasi internasional yang beranggotakan seluruh dunia, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan tindakan tegas terhadap Myanmar yang dianggap melakukan pembersihan etnis terhadap etnis Rohingya. PBB memiliki peran penting dalam isu kemanusiaan yaitu menciptakan perdamaian dunia serta menjaga hak-hak asasi manusia di seluruh dunia. Karena itu, PBB melakukan tindakan tegas terhadap Myanmar dengan memberikan surat peringatan kepada Myanmar yang dirasa telah melakukan pelanggaran atas hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya (Ridhoi, 2017).

Tidak hanya PBB yang melakukan protes terhadap tindakan yang dilakukan oleh Myanmar ada pun sejumlah kepala negara ikut menyampaikan rasa kekecewaannya seperti Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Presiden Indonesia ini memberikan respon terhadap krisis kemanusiaan yang dilakukan Myanmar terhadap salah satu etnis nya yaitu etnis Rohingya. Hal ini sangat disesalkan oleh Jokowi terhadap sikap Myanmar terhadap etnis Rohingya. Sehingga Jokowi mengutus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke

Myanmar untuk meminta Pemerintah Myanmar agar memberikan perlindungan kepada semua warganya, termasuk warga Rohingya.

Adapun Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyangkan sikap dunia internasional yang hanya diam saja melihat penderitaan etnis Rohingnya yang seharusnya menyelesaikan masalah ini yang merupakan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Myanmar. Kasus yang menimpa etnis Rohingnya ini merupakan isu internasional yang membuat negara Turki ikut andil dalam menyelesaikan isu Rohingnya. Dengan ini Turki akan terus mempertahankan sikap terkait dengan krisis di Rakhine dan mengharapkan sikap yang sama dari negara lain. Dunia seakan diam dalam menghadapi isu Rohingnya oleh junta militer Myanmar. Turki terus berusaha dan inisiatif intensif untuk mengakhiri tragedi kemanusiaan di etnis Rohingnya. Turki menyangkan sikap diam yang dilakukan oleh negara-negara muslim terhadap nasib Rohingnya yang merupakan etnis muslim yang sedang mengalami tindak kekerasan dan diskriminasi yang menelan banyak korban jiwa. Seharusnya negara-negara muslim melakukan tindakan dan kecaman keras kepada Myanmar agar menyelesaikan masalah tersebut.

Bagi negara-negara ASEAN khususnya, masalah yang dialami oleh salah satu anggotanya itu yaitu Myanmar merupakan masalah yang sensitive karena prinsip dari ASEAN sendiri yang non intervensi namun ASEAN sebagai organisasi regional memiliki peran sebagai wadah untuk dialog bagi negara-negara yang memiliki masalah tak terkecuali dengan isu Rohingnya ini. Pada akhirnya kasus Rohingnya menjadi salah satu tragedi kemanusiaan serius di era ini. Di antara kesulitan ASEAN untuk berperan aktif untuk menyelesaikan masalah Rohingnya adalah prinsip non intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi pada Negara anggota. Selain itu juga, kesepakatan dalam menyelesaikan

isu Rohingya belum terlihat jelas di kalangan para pemimpin ASEAN. Bisa saja, hal ini dikarenakan kurangnya informasi yang lugas dan transparan mengenai realita sebenarnya yang mereka dapatkan, kebanyakan masih terjebak dengan sifat normative dalam sistem Internasional. Akibatnya, sejauh ini banyak persoalan kemanusiaan yang terjadi di kawasan ASEAN yang belum mendapatkan penanganan secara maksimal. Lain halnya dengan Indonesia, Sikap proaktif yang ditunjukkan Indonesia dalam membantu penyelesaian masalah Rohingya adalah amanat konstitusi yang wajib ditunaikan. Kedua, amanat Piagam ASEAN yang mulai berlaku sejak 15 Desember 2008, di mana Indonesia telah meratifikasinya menjadi Undang-Undang Nomor 38/2008. Piagam ASEAN menyatakan bahwa setiap negara anggota memiliki keterikatan untuk memajukan dan menghormati HAM serta bekerja sama untuk tidak mengalihkan beban pada sesama negara anggota lain, tetapi bekerja sama untuk mencari solusi. Konvensi Penghapusan Penyiksaan (*Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman, Degrading Treatment, or Punishment*) tahun 1984 yang telah diratifikasi Indonesia di tahun 1998, menjadikan problem pengungsi Rohingya menjadi salah satu tanggung jawab Indonesia (Sudibjo, 1979).

Konvensi ini menyatakan bahwa larangan bagi negara anggota untuk mengusir atau mengembalikan maupun mengekstradisikan ke negara lain seseorang atau sekelompok orang yang memiliki cukup alasan bahwasannya dia berada dalam ancaman penyiksaan atau kekerasan. Dari kondisi ini, kebijakan untuk menerima dan membantu para pengungsi Rohingya yang terdampar di Indonesia beberapa waktu silam sudah tepat. Namun, jika kekerasan tidak juga dihentikan oleh Myanmar, harusnya masyarakat internasional dapat bertindak lebih tegas atas Myanmar berdasarkan konsep yang dikenal dalam hukum internasional yaitu *Responsibility to Act* (R2P). R2P adalah suatu tindakan oleh masyarakat

internasional yang tidak mengenal batas wilayah kedaulatan untuk memastikan agar kejahatan terhadap kemanusiaan seperti *ethnic cleansing* atau genosida tidak terjadi.

Melalui menteri luar negerinya, Indonesia melakukan diplomasi persuasive terhadap pemerintah Myanmar. Hal ini dinilai sebagai cara yang cukup baik dalam membantu perdamaian atas konflik etnis Rohingya. Tiga negara, Amerika Serikat (AS), Australia dan Swedia memuji langkah diplomasi yang dilakukan oleh Retno Marsudi untuk membantu menyelesaikan masalah di Rakhine. Pujian ini disampaikan saat Retno menghadiri pertemuan mengenai situasi di Rakhine di sela-sela Sidang umum PBB di New York, AS. Dalam pertemuan tersebut, Retno menjelaskan langkah diplomasi marathon yang dilakukan Indonesia dengan melakukan diplomasi secara marathon ke Bangladesh dan Myanmar. Selain bertemu dengan pemangku kepentingan di kedua negara tersebut, Retno juga menyampaikan formula 4+1 yang merupakan pemulihan keamanan dan perdamaian, menahan diri untuk tidak menggunakan kekerasan, perlindungan bagi seluruh penduduk tanpa memandang latar agama dan etnis, serta akses bantuan kemanusiaan (Maulana, 2017).

C. Cina Bersikap menolak Resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa Terhadap Isu Rohingya di Myanmar.

Isu yang terjadi di wilayah Rakhine, Myanmar ini melibatkan beberapa negara didunia. Salah satu negara yang terlibat dalam isu Rohingya adalah Cina. Cina di abad 21 merupakan negara yang modern, maju, serta berpengaruh dalam peningkatan ekonomi dunia sehingga tidak dapat dianggap remeh dengan statusnya saat ini. Berbicara mengenai peran Cina dalam isu Rohingya, tidak sedikit dari

negara didunia meminta Cina untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan ini namun tindakan yang dilakukan oleh Cina justru membuat banyak negara kecewa dan geram. Hubungan Cina dengan Myanmar bisa dikatakan cukup dekat untuk itu Cina disini dapat melakukan soft diplomasi untuk meredakan sekaligus menghentikan pelanggaran hak asasi manusia etnis Rohingya oleh junta militer Myanmar.

Etnis Rohingya merupakan satu dari jumlah etnis yang mengalami kekerasan maupun tindak pelanggaran hak asasi manusia didunia. Kekerasan yang dialami oleh etnis Rohingya tidak menjadi hal yang wajar maupun dimaklumi karena melihat dari fakta yang terjadi banyak diantara mereka yang mengalami kekerasan, penculikan bahkan pemerkosaan yang sangat tidak manusiawi. Akibat dari isu ini banyak negara mempertanyakan peran Myanmar sebagai negara yang melindungi dan menjaga warga negaranya serta peran Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi sebagai Pemenang Nobel Perdamaian yang seolah tidak melakukan tindakan yang berarti. Negara-negara di dunia internasional merasa kecewa terhadap sikap yang dilakukan oleh Myanmar terhadap etnis Rohingya. Beberapa diantaranya seperti Indonesia, Brunei Darussalam, Jerman dan beberapa negara lainnya mengancam aksi yang dilakukan oleh Myanmar terhadap etnis Rohingya meskipun, steatmen ini dibantah oleh Myanmar sendiri. Di samping itu Cina sebagai negara yang punya hak veto di PBB memilih bersikap diam terhadap apa yang terjadi di Myanmar. Bahkan Cina juga akan menghalangi seluruh upaya untuk menginternasionalisasi krisis Rohingya ini yang dianggap hanya masalah yang tidak serius. Sikap yang ditunjukkan itu mencerminkan ketidakpedulian Cina terhadap isu Rohingya yang dilakukan oleh junta militer Myanmar (Dasgupta, 2017).

Sikap Cina dalam isu Rohingya dapat dikatakan berubah-ubah hal ini terlihat saat Cina memberikan pernyataan bahwa isu Rohingya merupakan masalah internal dan Serangan balik pasukan keamanan Myanmar melawan

teroris ekstremis dan usaha pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat sangat disambut baik namun pernyataan ini berbanding terbalik saat berada di markas PBB di New York, Cina menyampaikan pendapat yang berbeda. Cina yang bergabung dalam dewan keamanan PBB mengungkapkan keprihatinan atas kekerasan yang menimpa etnis Rohingya dan meminta agar segera dihentikan. Namun, nyatanya Cina tidak bersungguh-sungguh menyelesaikan masalah dan justru memperkeruh dengan keterkaitannya dalam kepentingannya di Myanmar sehingga Cina tidak dapat mengecam Myanmar sebagai tindak pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya. Cina juga bersaing dengan Amerika dalam menancapkan pengaruhnya di Myanmar (Setiawan A. , Kepentingan Cina di Balik Kekerasan Berdarah di Rakhine, 2017).

Selain itu, Cina pernah mendapatkan kecaman dan juga masalah mengenai pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur yang merupakan suku minoritas yang berada di Xinjiang. Memang sudah menjadi rahasia umum bila Cina sendiri tidak terlalu peduli dalam masalah HAM sehingga perlakuan yang Cina berikan terhadap isu Rohingya ini menjadi cerminan sikap yang diberikan Cina terhadap etnis Uighur juga. Saat itu pemerintah Cina dihujani kritik dari dunia, termasuk Indonesia atas perlakuan mereka terhadap suku Uighur yang dianggap menindas. Dengan adanya pengalaman tentang masalah etnis seharusnya Cina memberikan solusi kepada Myanmar terhadap masalah yang sedang terjadi terhadap isu Rohingya ini. Namun kenyataannya justru Cina memperkeruh keadaan terhadap pernyataannya yang mendukung Myanmar dalam melindungi keamanan nasionalnya yang artinya mendukung tindakan Myanmar terhadap etnis Rohingya meskipun dalam pernyataannya Cina menentang serangan dengan kekerasan yang baru-baru ini terjadi di negara bagian Rakhine. Dalam sebuah pertemuan di PBB Cina juga mendukung serta

memahami upaya Myanmar untuk melindungi keamanan di Rakhin dan berharap perang dapat segera padam.

Cina mengungkapkan simpati dengan mereka yang telah melarikan diri ke Bangladesh dan akan mengirim bantuan kemanusiaan ke Bangladesh. Cina menganjurkan Myanmar dan Bangladesh menyelesaikan masalah tersebut melalui dialog dan konsultasi. Cina bersedia untuk terus mempromosikan pembicaraan damai dengan caranya sendiri, dan berharap masyarakat internasional dapat memainkan peran yang konstruktif untuk meredakan situasi dan mempromosikan dialog. Akan tetapi, tidak sedikit yang mengatakan bahwa ada udang dibalik batu atas sikap yang dilancarkan oleh Cina dalam menangani isu Rohingya ini. Diketahui Cina dan Myanmar sendiri memiliki hubungan ekonomi dan diplomatik yang erat. Cina telah menentang harapan bahwa demokratisasi di bekas negara bernama Birma itu dapat menyebabkan hubungan yang lebih lemah antara kedua negara. Sekitar satu juta etnis Rohingya tinggal di Negara Bagian Rakhine sampai kekerasan baru-baru ini terjadi. Sebagian besar menghadapi pembatasan perjalanan yang kejam dan ditolak kewarganegaraannya di negara di mana banyak umat Buddha menganggap mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. (Berlianto, 2017).